

POLA REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI GOLONGAN KARYA TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA JAMBI

**Sutri Destemi Elsi
Hartati**

elsisutri@gmail.com
tatiek_dr@yahoo.com

Fisipol Universitas Jambi

1

ABSTRACT

This study analyzes the recruitment and cadre creation pattern of Golongan Karya for women, especially in the city of Jambi. UU No. 2 of 2011 concerning Political Parties requires political parties to fill a 30 percent quota of women's representation in the management of political parties. It is important to know how the recruitment patterns and cadre creation patterns are carried out by political parties with the highest number of cadres in Indonesia, namely the Golongan Karya party because the obligation of political parties is not just to fill the quota but also to create a good recruitment pattern and produce women cadres who are reliable so they can become representatives of the people who have good competence. Analysis using qualitative descriptive method with in-depth interviews, observation and documentation shows that the recruitment and cadre creation patterns are still very weak, absence of a selection system in recruiting cadres, lack of programs and no strategic measures implemented by party administrators. It can be caused by the weak law that regulates the function of political parties, especially regarding recruitment and cadre creation patterns and the absence of sanctions for political parties that do not carry out their functions properly so that often political parties ignore the urgency of women's representation.

Keywords: *Recruitment, Cadre creation, Women and Golkar Party*

PENDAHULUAN

Politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, yang tidak pantas dimasuki oleh perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan femininitas karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak

melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni¹. Idealnya, partisipasi politik perempuan muncul karena ada ketertarikan dari perempuan itu sendiri. Kedua, memang

¹Loura Harjaloka, *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.

ada faktor akomodasi partai politik. Ketiga, didorong oleh regulasinya².

Perkembangan situasi sosial dan politik di masyarakat saat ini sudah mulai menunjukkan perkembangan partisipasi kaum perempuan dalam politik dan pemerintahan meskipun belum ideal seperti yang diharapkan, hal ini dapat disebabkan mulai berkembangnya pendidikan politik di kalangan kaum wanita melalui pendidikan formal maupun informal. Keterwakilan kaum perempuan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masih menjadi topik perbincangan yang menarik. Keterwakilan perempuan di parlemen itu sangat penting karena penyusunan Undang-undang di berbagai sektor juga terkait dengan perempuan. Banyaknya perbincangan yang muncul juga memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan juga menjadi prioritas utama dan penentu eksistensi partai, bahwa partai politik betul-betul harus memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang.

Selain jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif ataupun dalam pencalonan kepala daerah, kualitas dan kredibilitas kaum perempuan

juga masih seringkali diragukan, kaum perempuan dianggap tidak mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Artinya, pendidikan politik, kemampuan manajerial serta kepemimpinan yang dimiliki kaum wanita saat ini belum kompetitif dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Dorongan dan harapan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan semakin menguat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut mewajibkan bahwa kepengurusan dalam tiap partai politik harus mencakup 30 persen perempuan. Aturan ini menjadi landasan untuk dijaminnya hak politik perempuan. Namun, seringkali justru parpol yang mengabaikan urgensi keterwakilan perempuan ini.

Sebelum pemilu legislatif pada tahun 2014 sejumlah parpol sudah menyuarkan keberatannya untuk memenuhi kuota 30 persen calon legislatif perempuan, alasannya disebabkan masih sedikit perempuan yang mau terjun ke politik, akan tetapi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara tegas tidak lagi mempertimbangkan alasan tersebut. Undang-undang ini menyebabkan partai politik harus berusaha lebih keras dalam berupaya merekrut kaum perempuan sebagai anggota partai sekaligus mendidik mereka untuk menjadi kader-kader politik yang siap berkompetisi

²Ida Fauziah (Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI), *Keterwakilan Perempuan di Parlemen Masih Rendah*, diakses dari www.voaindonesia.com pada tanggal 18 Februari 2018, 0.10 WIB.

dalam dunia politik berdampingan dengan kaum laki-laki.

Studi tentang gender yang membahas tentang kuota 30 persen pada perempuan lebih banyak menitikberatkan pada proses hadirnya kebijakan afirmasi tersebut. Tentu saja hasil dari studi tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan afirmasi kuota 30 persen pada perempuan ini menyedot perhatian banyak pihak dan memberikan kontribusi pada perjuangan politik perempuan³. Akan tetapi semestinya persoalan rendahnya partisipasi politik perempuan ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang turut berpengaruh seperti peran partai politik dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

Tuntutan Undang-undang pada akhirnya menuntut partai politik memperbaiki pola rekrutmen dan kaderisasi terhadap kaum perempuan. Lemahnya sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang tidak efektif, dan sanksi yang lemah dari pemerintah kepada partai politik yang tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan merupakan penyebab minimnya kepengurusan perempuan dalam partai politik itu sendiri. Partai politik harus

mendorong kader perempuan yang berkualitas untuk mencalonkan diri. Oleh sebab itu, diperlukan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran dan posisi perempuan di partai politik serta strategi untuk mendorong penguatan peran dan posisi perempuan di politik.

Persoalan kaderisasi juga dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya di dalam partai politik perlu dibentuk karakter pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur. Untuk itu, partai politik terutama para ketua umumnya harus memikirkan langkah-

Sutri Destemi Elsi, Hartati: Pola Rekrutmen Dan Kaderisasi Perempuan

terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga dapat mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Berdasarkan data tentang jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, jumlah keterwakilan perempuan memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah keterwakilan laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti minimnya jumlah kader perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau dapat disebabkan karena rendahnya kualitas dan elektabilitas kader perempuan di mata masyarakat. Tiga partai dengan jumlah anggota terbanyak di

³ Mohammad Yusuf Pambudi, *PEREMPUAN DAN POLITIK (Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang)*, diakses dari Jurnal Unair.ac.id pada tanggal 18 Februari 2018, 1.53 WIB.

Provinsi Jambi adalah Partai Golkar (10.804), Partai Perindo (9.002), dan Partai Amanat Nasional (6.439) seperti pada tabel berikut⁴:

Tabel I.1
**Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jambi
Periode 2014-2019**

No	Partai Politik	Lk	Pr	Total	%
1	Demokrat	5	4	9	16,36
2	GOLKAR	7	1	8	14,55
3	PDI-P	6	1	7	12,73
4	GERINDRA	5	1	6	10,91
5	PKB	5	1	6	10,91
6	PAN	5	0	5	9,09
7	PPP	4	0	4	7,27
8	NASDEM	3	0	3	5,45
9	PKS	3	0	3	5,45
10	HANURA	3	0	3	5,45
11	PBB	1	0	1	1,82
Jumlah Total		47	8	55	100

Sumber : DPRD Provinsi Jambi dalam BPS Provinsi Jambi, 2016

Dari 55 kursi yang berasal dari 10 partai politik, hanya 8 kursi yang diisi oleh kaum wanita. Fakta yang paling mencolok adalah jumlah keterwakilan perempuan dari partai Golkar dengan rasio perbandingan 7:1, semestinya partai Golkar yang dikenal sebagai “partai tua” dan yang disebut sebagai “partai kader” idealnya memiliki banyak peluang dalam menempatkan kader perempuannya di kursi legislatif, selain itu dari segi kuantitas partai Golkar menempati urutan pertama dalam jumlah anggota, akan tetapi

jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Provinsi Jambi justru menunjukkan hal berbeda. Oleh sebab itu menjadi menarik untuk diteliti bagaimana sesungguhnya pola rekrutmen dan kaderisasi partai Golkar terhadap kaum perempuan khususnya di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai literatur, dokumentasi atau wawancara yang dilakukan kepada sumber utama terkait dengan cara menganalisis antara konsep, kebijakan dan hasil yang ditemukan di lapangan saat dilakukannya penelitian.

Data dan analisis yang akan menjadi bagian dari hasil kajian ini diperoleh dengan metode kajian pustaka (*literary studies*) dan diskusi terbatas. Kajian pustaka dilakukan dengan mempelajari undang- undang, juga berbagai artikel dan tulisan yang membahas mengenai isu tersebut. Sementara diskusi terbatas dilakukan untuk mendapatkan data primer yang relevan mengenai upaya rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang ada di provinsi Jambi terhadap kaum perempuan.

⁴Diakses dari KPUD-JAMBIPROV.GO.ID, pada tanggal 18 Februari 2018, 0.53 WIB.

TINJAUAN PUSTAKA

Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu, seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas'ood bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian⁵.

Pemilihan dengan kriteria universal merupakan seleksi untuk memainkan peranan dalam sistem politik berdasarkan kemampuan dan penampilan yang ditunjukkan lewat tes atau ujian dan prestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria partikularistik adalah pemilihan yang bersifat primordial yang didasarkan pada suku, ras, keluarga, alamater atau faktor status⁶.

Menurut teori Almond dan Powell prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. Prosedur Tertutup adalah Rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang
2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan.

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Hal inilah yang membuat terbukti apa yang di ungkapkan oleh Maurice Duverger bahwa pada dasarnya semua orang yang berbakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki posisi elit, tetapi mereka kalah karena dihalangi oleh elit politik yang sedang berkuasa yang membentuk oligarki kekuasaan.

⁵Hesel Nogi Tangkilisan, Kebijakan Publik yang Membumi, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003) 188

⁶ibid

Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut⁷;

1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Didalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu diketahui secara luas antara lain:

- a. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi

partai merupakan bagian terpenting didalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-kolisi antar partai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.

- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu, jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
- c. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi adalah setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.
- d. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Pada era modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi didunia

⁷Syamsuddin Haris, Pemilu Langsung di Tengah Oligarki (Jakarta:PT Gramedia,2005)180

politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan

Kaderisasi Partai Politik

Sistem kaderisasi adalah bagian dari serangkaian kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan agar kelak menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik sekaligus mencari kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dari system kaderisasi adalah suatu rangkaian kegiatan penyiapan sumber daya manusia secara terdidik atau secara berkesinambungan guna menghasilkan para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik sekaligus menjadi kader militan (sungguh-sungguh) yang dipersiapkan untuk mengganti pemimpin yang lama.

Dalam tahapan penetapan calon kader yang akan menjadi bagian partai politik. Menurut Haryanto terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah :⁸

1. Pengalaman Organisasi

Pengalaman ini baik selama ia mejadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

2. Tingkat Pendidikan

Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan prilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.

3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya. Dapatlah dikatakan bahwa di setiap system politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang

⁸Haryanto, Politik suatu pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1982) 47

dilaksanakan oleh tiap-tiap system politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Sistem Kaderisasi adalah cara yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya di Provinsi Jambi terhadap kaum perempuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan meneruskan eksistensi partainya dan mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen Politik merupakan proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui organisasi organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan tertentu seperti golongan buruh, petani, pemuda dan sebagainya. Dalam hal proses rekrutmen ini Partai Golkar tidak terlalu

sulit untuk merekrut kader, dan didalam proses rekrutmen ini tidak ada paksaan sedikit pun. Proses Rekrutmen yang dilakukan partai Golkar juga terbuka dan tidak membedakan.

Proses Rekrutmen Partai Golkar tidak hanya memfokuskan kaum laki-laki saja, tetapi semua masyarakat yang ingin terjun langsung ke dunia politik.

Adapun syarat Rekrutmen anggota baru Partai Golkar adalah :

1. Minimal berusia 17 tahun
2. Isi Formulir Pendaftaran /pendaftaran anggota partai Golkar
3. Tidak ada Paksaan
4. setiap anggota harus ikut pelatihan Kader maksimal 2 kali dalam setahun

Partai Politik sebagai suatu organisasi yang sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan Nasional. dimana pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi kepada kepentingan partai politiknya saja tetapi harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Pemimpin itu tidak lahir dengan sendirinya, jadi disinilah peran partai politik itu sangat dibutuhkan. Seperti syarat perekrutan yang dilakukan Partai Golkar bahwa untuk menjadi kader Partai Golkar itu cukup hanya mengisi formulir dan minimal sudah berusia 17 tahun. Apakah semudah itu untuk menjadi kader Partai Golkar? mengapa dalam

proses perekrutan kader partai Golkar tidak dilakukan seperti menyeleksi anggota ABRI?, Didalam proses perekrutan inilah Partai Golkar harus benar- benar teliti dalam merekrut calon, sehat jasmani dan rohani tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh KPUD yakni:

1. Bebas Narkoba
2. Tidak pernah melakukan pelecehan seksual
3. Bebas dari korupsi

Partai Golkar juga tidak mempunyai Panitia Seleksi untuk menyeleksi setiap kader yang ingin bergabung kedalam partai Golkar, hanya dengan mengisi Form Formulir saja sudah bisa ikut menjadi kader Partai Golkar. Disinilah partai Golkar harus benar- benar menyeleksi setiap orang yang ingin menjadi kader Partai Golkar. karena Partai Politik lah sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah

Fungsi partai politik ini sangat berkaitan erat dengan pengkaderan dan merekrut calon – calon anggota legislatif maupun anggota eksekutif , disinilah partai politik harus ekstra hati – hati dalam proses perekrutan, sebab jika partai politik salah dalam melakukan perekrutan politik, maka otomatis perjalanan demokrasi didalam suatu negara bisa pincang. Maka perlu dituntut supaya partai politik lebih profesional dalam melakukan fungsinya yaitu sebagai sarana rekrutmen politik,

partai politik harus benar – benar memilih orang orang yang memang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi. Jika boleh partai politik melakukan pengkaderan seperti ABRI menerima anggota baru. Abri dalam menerima anggota baru penuh dengan seleksi – seleksi, mulai dari seleksi pengumpulan berkas sampai dengan seleksi yang paling akhir. Didalam pengkaderan ini tidak bisa nego – nego, mungkin karena dia sahabat ataupun yang memiliki banyak amunitas mereka bisa masuk dengan seenaknya? Tidak!.. Disinilah partai politik tidak bisa pilih kasih dalam perekrutan anggot. Partai politik harus netral dalam hal ini.

Proses kaderisasi partai Golkar :

1. Setiap kader harus mengikuti pelatihan kader 2 kali setahun
2. Mengikuti Karakterdes (tingkat desa / kelurahan), yang diselenggarakan oleh DPD 2 (Orientasi Fungsionaris) tingkat Kota, dan
3. TOT (Training Of Trainee) ditingkat Provinsi

Di Kota Jambi ada 5 Dapil

1. Dapil I (Kota Baru) berjumlah 6 kader
2. Dapil II(Alam Barajo) berjumlah 7 kader
3. Dapil III(Telanai) berjumlah 8 Kader
4. Dapil IV(Pasar) berjumlah 12 kader
5. Dapil V (Jambi Selatan dan palmerah) berjumlah 12 kader

Caleg partai Golkar berjumlah 45 orang yang ikut berkontestasi pada pemilu tahun 2019 dan caleg laki laki berjumlah 29 orang dan perempuan berjumlah 16 orang. Didalam proses kaderisasi yang dilakukan Oleh Partai Golkar , setiap Kader harus ikut pelatihan kader 2 kali dalam setahun. Apa cukup 2 kali dalam setahun pelatihan kader? . Partai Politik tidak akan tahu apakah Kader tersebut hadir pada saat pelatihan yang dilaksanakan dalam dua kali setahun itu,dan Parpol juga tidak akan tahu apakah kader dari Golkar itu sendiri dekat dengan masyarakat, apakah kader tersebut aktif dalam organisasi- organisasi kemasyarakatan.

Partai Politik khususnya Partai Golkar harus benar – benar mendidik kader partai tersebut supaya sebelum mereka duduk sebagai calon pemimpin , mereka sudah terlatih dalam hal kamasyarakatan. karena masyarakatlah yang harus menjadi prioritas dari setiap pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus Pito, Toni, dkk.Mengenal Teori-teori Politik, Nuansa, Bandung, 2006.
- Suprihatini, Amin. Partai Politik Di Indonesia, Cempaka Putih, Klaten, 2008.
- Budiarjo, Miriam.Dasar-dasar Ilmu Politik,PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2006.
- Harahap, Abdul Asri,.Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada, PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2005.
- Amal, Ichlasul,Teori-teori Mutakhir Partai Politik. PT. Tiara WacanaYogya. Yogyakarta, 1996.
- King, Dwight Y.,Pemilihan Umum 1955 dan 1999Keserupaan dan Kesenambungan, Makmur Makka (Eds),Jakarta, 2002.
- Moleong, Lexy J.,Metodologi Penelitian Kualitatif.Remaja Rosda Karya,Bandung. 2004
- Rahman H.I, A, 2007.Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu, Yogyakarta.